

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KKNI

A. Fatoni

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung
aa.fatoni@ymail.com

Abstract

KKNI embodies the quality and identity of the Indonesian nation associated with national education and training system is owned by Indonesia. (Presidential Decree No. 8 of 2012). In KKNI perspective, every program of study is required to clarify the "profile of graduates' expected through tracking studies, feasibility studies and analysis of the needs in the community. Based curriculum development KKNI namely to help, understand, and control the implementation of the curriculum, so that educational institutions can be cooperatively and independently identify curriculum requirements with the principle of (1) productivity, (2) Democratization (3) Cooperative, effectiveness and efficiency, (4) Direct the vision, mission and objectives set out in the curriculum.

Keywords: *management, KKNI-based curriculum*

A. Pendahuluan

Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sarat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seyogyanya kurikulum melakukan upaya perubahan, pengembangan dan inovasi terhadap tuntutan tersebut. Sebuah keniscayaan bila kurikulum terus hadir dengan pola-pola perubahan sebagai hasil dari pemikiran masyarakat, karena “pengguna” kurikulum pada akhirnya juga masyarakat. Respon terhadap perubahan kurikulum tersebut dapat dilihat dari banyaknya aturan yang memayungi penerapan kurikulum baru, misalnya lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kebijakan tentang implementasi kurikulum 2013, lahirnya Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (baca: KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Implikasi Kebijakan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pola perubahan kurikulum setiap program studi bahkan penyesuaian materi ajar (*content*) yang akan disampaikan kepada mahasiswa.

KKNI sendiri merupakan kerangka acuan minimal yang menjadi ukuran, pengakuan penjenjangan pendidikan yang dilakukan. KKNI juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. (Perpres No. 8 tahun 2012)

Dalam perspektif KKNI, setiap program studi diharuskan memperjelas “profil lulusan” yang diharapkan melalui kegiatan pelacakan studi, studi kelayakan dan analisis kebutuhan di masyarakat. Profil lulusan mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai mahasiswa setelah lulus yang merujuk pada empat aspek kebutuhan (1) sikap (*attitude*), (2) bidang kemampuan kerja, (3) pengetahuan, dan (4) manajerial dan tanggung jawab. Keempat kemampuan kemudian harus dijabarkan ke dalam sebuah capaian pembelajaran (*learning outcome*) pada setiap mata kuliah di program studi. Sehingga nantinya, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Semester (RPS) harus didasarkan pada capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan.

Dalam rangka menyikapi perkembangan dunia pendidikan tinggi dan sekaligus tuntutan *stakeholders*, maka program studi di perguruan tinggi diharuskan segera berbenah dan merespon tuntutan tersebut dengan sebaik-baiknya, diantaranya adalah dengan menyusun kembali muatan kurikulum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai langkah untuk menentukan arah kurikulum program studi, maka Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi UMP pada tanggal 20 Agustus 2014 melaksanakan kegiatan *workshop* penyusunan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan peraturan Dirjen DIKTI (UU No.12/2012 tentang KKNI).

Berdasarkan pada dua kebijakan tersebut, kurikulum 2013 dan KKNI maka dirasa perlu merumuskan kembali Kurikulum yang betul-betul mengarah pada kebutuhan tersebut. Dari sisi KKNI, kurikulum Pada perguruan tinggi harus memperjelas diri Profil Lulusan dan Capaian Kompetensi yang diharapkan, sementara dari sisi kebijakan kurikulum 2013, konten materi ajar yang didisampaikan juga harus benar-benar merujuk pada kebutuhan- kebutuhan stakeholder sebagaimana yang terdapat dalam Permendikbud No. 67 tahun 2013.

Kurikulum menjadi aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional dan menjadi komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Bahkan studi tentang manajemen kurikulum saat ini semakin mendapat banyak perhatian dari kalangan ilmuwan dan para ahli yang menekuni bidang kurikulum, administrasi pendidikan, dan teknologi pendidikan. Beralasan bahwa kurikulum menempati bagian terpenting pada suatu lembaga pendidikan. Menjadi wajar karena dunia mengalami era globalisasi dan banyak perubahan dalam berbagai lini kehidupan serta mempengaruhi dunia pendidikan.

Perkembangan yang terkait dengan IPTEK, masyarakat, berbangsa dan bernegar, maupun isu-isu di dalam dan di luar negeri merupakan tantangan yang harus dipertimbangkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini KEMENDIKBUD/Departemen Pendidikan Nasional harus mampu dengan cepat menjawab tantangan-tantangan tersebut untuk direalisasikan dalam program pendidikan di wilayah kerjanya.

Banyak aspek pembaharuan dalam bidang pendidikan yang berpengaruh terhadap kurikulum, seperti program percepatan pembelajaran, kurikulum muatan lokal, desentralisasi, pelaksanaan remedial dan pengayaan, manajemen berbasis sekolah (MBS), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 dan baru-baru ini yaitu kurikulum berbasis KKNI

Berdasarkan hal tersebut di atas pemakalah bermaksud melakukan pembahasan tentang konsep manajemen kurikulum KKNI dimaksudkan agar dapat membantu, memahami, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan bisa secara kooperatif dan mandiri mengidentifikasi kebutuhan kurikulum.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Manajemen Kurikulum

a. Definisi manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang di miliki oleh sekolah atau organisasi yang di antaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses¹.

Manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik².

Menurut para ahli disebutkan bahwa manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Stoner, seperti yang dikutip Fachruddin mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan organisasi dan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.

¹Eliadiana, "pengertian manajemen, kurikulum, manajemen kurikulum, dan konsep manajemen kurikulum, <http://eliadian.blogspot.com>, 20:26/02.10.2015.

²Nanang Fattah, *Landasan manajemen pendidikan* (Bandung: Remaja rosdakarya, 2009), hlm.1

Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (The art getting things done through people)³.

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien.

Harold Koontz & O'Donnel dalam bukunya yang berjudul "Principles of Management" mengemukakan, manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain.

b. Definisi kurikulum

Menurut para memandang bahwa kurikulum sebagai seluruh kegiatan yang diberikan kepada siswa dibawah tanggung jawab sekolah (*all the activities that are provided of the students by the school*)⁴.

Menurut Oemar Hamalik, Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah.

Menurut Supandi, Kurikulum adalah sebagai suatu perangkat pelbagai mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, batasan ini nampak jelas pada kurikulum 1968 Dikdasmen.

Romine, "Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities and experiences which pupils have under the direction of the school, wether in the classroom or not." Kegiatan kurikuler tidak terbatas dalam ruangan kelas saja, melainkan mencakup juga kegiatan di luar kelas. Karena itu menurut pandangan modern kegiatan intra kulikuler dan ekstra kulikuler tidak ada pemisahan yang tegas, semua kegiatan yang bertujuan memberikan pengalaman pendidikan bagi siswa adalah kurikulum.

Alice Miel, "Curriculum in composed of the experiences children undergo, it fallows as a corolary that the curriculum is the result of interaction of a complexity of factors, including the physical environment and the desires, beliefs, knowledge attitudes, and skill of the person served by and serving the school, namely, the learners, community adults, and educators (not forgetting the custodians, clerks, secretaries and other non teaching employees of the school)⁵.

³ Nanang Fattah, *Landasan manajemen pendidikan* (Bandung: Remaja rosdakarya, 2009), hlm.3.

⁴ Rusman, *manajemen kurikulum* (Jakarta: Rajawali pers, 2009), hlm3.

⁵ Eliadian, "pengertian manajemen, kurikulum, manajemen kurikulum, dan konsep manajemen kurikulum, <http://eliadian.blogspot.com>, 20:26/02.03.2013.

Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu⁶.

Jadi menurut penulis bahwa Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu⁵. Kurikulum adalah program pendidikan (sekolah) bagi siswa berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan⁶.

c. Definisi manajemen kurikulum

Manajemen kurikulum ialah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan⁷.

Manajemen Kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan dititik beratkan pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.

Manajemen Kurikulum adalah proses kerjasama dalam pengolahan kurikulum agar berguna bagi lembaga untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen Kurikulum merupakan suatu sistem kurikulum yang berorientasi pada produktivitas dimana kurikulum tersebut berorientasi pada peserta didik, kurikulum dibuat sebagaimana dapat membuat peserta didik dapat mencapai tujuan hasil belajar.

Manajemen Kurikulum adalah pemberdayaan dan pendayagunaan manusia, materi, uang, informasi, dan rekayasa untuk dapat mengantarkan anak didik menjadi kompeten dalam berbagai kehidupan yang dipelajarinya.

⁶Eliadian, "pengertian manajemen, kurikulum, manajemen kurikulum, dan konsep manajemen kurikulum, <http://eliadian.blogspot.com>, 20:26/02.10.2015.

⁷Rusman, *manajemen kurikulum* (Jakarta: Rajawali pers, 2009), hlm.3.

Manajemen Kurikulum adalah upaya untuk mengurus, mengatur, dan mengelola perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan pada lembaga pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu⁸.

Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum di maksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pada pemerintah¹².

d. Ruang lingkup manajemen kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Lingkup Manajemen Kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Studi manajemen kurikulum adalah bagian integral dari studi kurikulum. Pokok kegiatan utama studi manajemen kurikulum adalah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, dan perbaikan kurikulum. Studi manajemen pengembangan kurikulum pada dasarnya eratkaitan dengan studi administrasi pendidikan, dimana fungsi supervise telah tercakup di dalamnya¹⁴.

Beberapa ruang lingkup studi yang dikembangkan, yaitu:

- 1) Manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum, di dalam manajemen ini akan dipelajari masalah perencanaan kurikulum dan pengembangan selanjutnya penting mendapat perhatian, karena terkait erat dengan faktor-faktor mendasar, peran berbagai pihak dan metodologi pengembangan itu sendiri, sehingga merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan dan pengembangan kurikulum
- 2) Manajemen pelaksanaan kurikulum. Bidang ini mempelajari sebab erat kaitannya dengan keterlaksanaan kurikulum disekolah atau lembaga pendidikan dan latihan. Peran administrator (kepala sekolah) dan guru mendapat sorotan lebih tajam, dalam artian administratif.
- 3) Supervise pelaksanaan kurikulum. Bidang ini membahas lebih mendasar dan meluas, sebagai erat kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan personal sekolah, yang mendapat tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kurikulum,

⁸ eliadian, *Loc.cit.*

dan dengan cara bagaimanamereka seharusnya dipersiapkan agar mampu bertindak sebagai supervisor.

- 4) Pemantauan dan penilaian kurikulum. Peranan dan fungsinya sangat penting dalam rangka pengembangan, pelaksanaan, supervisi dan perbaikan kurikulum.
- 5) Perbaikan kurikulum. Bidang ini harusnya mendapatkan perhatian yang lebih oleh sebab erat kaitannya dengan upaya membina relevansi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan perkembangan masyarakat secara menyeluruh, yang ada akhirnya dengan dikembangkan suatu kurikulum yang lebih baik.
- 6) Desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum, perlu dikaji secara lebih lanjut berkaitan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah.
- 7) Masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum serta model kepemimpinan yang serasi pada konteks masyarakat yang berkembang dinamis dewasa ini.⁹

e. Prinsip Manajemen Kurikulum

Terdapat lima prinsip¹⁶ yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu sebagai berikut:

- 1). Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- 2). Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus beraskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- 3). Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang di harapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- 4). Efektivitas dan efesiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.

⁹Oemar Hamalik, *manajemen pengembangan kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm20.

- 5). Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen Dalam pengelolaan Kurikulum hendaknya juga memperhatikan prinsip-prinsip nilai ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits antara lain :
 - a) QS. Al-Hasyr 5 18
 - QS. As-Sajadah ayat 5
 - b) Hadits

f. Fungsi Manajemen Kurikulum

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi manajemen kurikulum¹⁷ di antaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- 2) Meningkatkan keadilan (equity) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
- 3) Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- 4) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikuum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan cirik khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

g. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

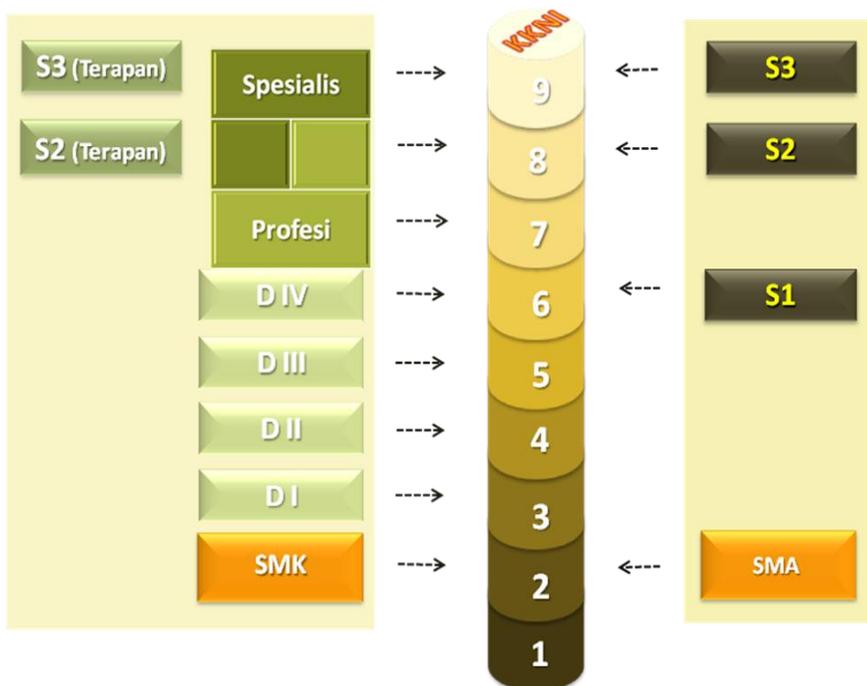
KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Dalam pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.

Umumnya kerangka kualifikasi disusun berjenjang dari terendah sampai ke yang tertinggi berdasarkan kemampuan bekerja, penguasaan pengetahuan yang dicapai melalui pendidikan atau ketrampilan yang diperoleh melalui pelatihan. European Qualification Framework (EQF) sebagai salah satu kerangka kualifikasi yang dirujuk dalam pengembangan KKNI, membagi jenjang kerangka kualifikasi dalam delapan tingkat dari jenjang pertama sampai jenjang delapan yang tertinggi. Jenjang pertama mencantumkan kemampuan dan pengetahuan dasar untuk melakukan pekerjaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jenjang 8 mencantumkan kemampuan tertinggi lulusan pendidikan doktor dengan kemampuan mengkreasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan atau profesi baru dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kondisi berkehidupan yang lebih baik. EQF menyepadankan jenjang kualifikasi dengan jenjang pendidikan atau pelatihan, bahkan dengan gelar yang disandangnya. Konsep pembelajaran sepanjang hayat nampak kuat mendasari pengembangan EQF.

h. Manajemen Kurikulum KKNI

KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (supply push) maupun pengguna (demand pull) tenaga kerja. Diskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain-lain, serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Agar lebih jelasnya dapat dilihat gambar dibawah ini.

Level lulusan pendidikan tinggi



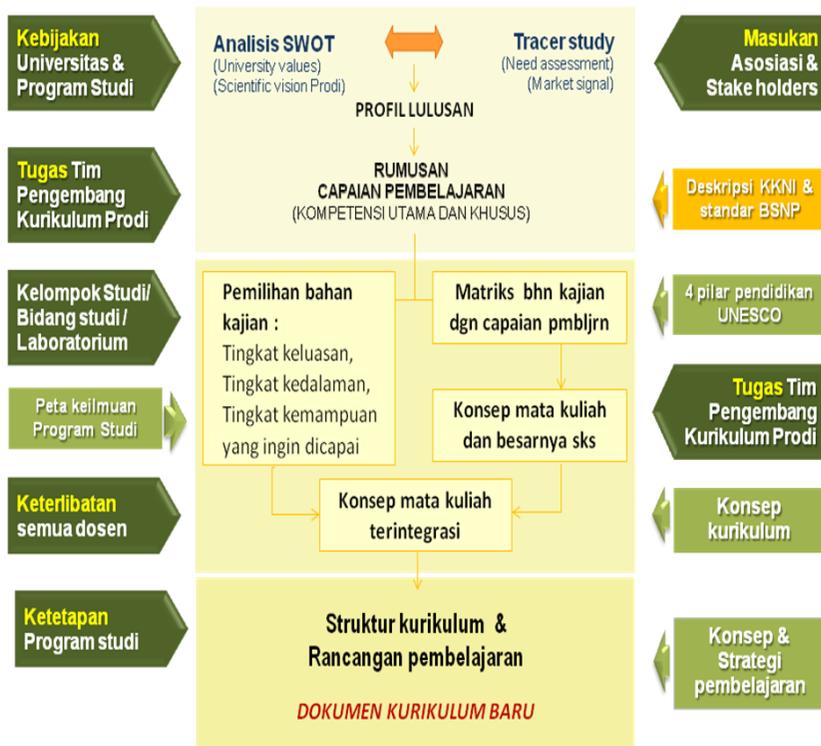
Penjenjangan kualifikasi pada KKKNI dengan jenjang sembilan sebagai jenjang tertinggi tidak serta-merta berarti bahwa jenjang tertinggi

KKNI tersebut lebih tinggi dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Eropa (8 jenjang) dan Hongkong (7 jenjang) atau sebaliknya lebih rendah dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Selandia Baru (10 jenjang). Hal ini lebih tepat dimaknai bahwa jenis kualifikasi pada KKNI dirancang untuk memungkinkan setiap jenjang kualifikasinya bersesuaian dengan kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan perguruan tinggi, kultur pendidikan/pelatihan di Indonesia saat ini serta gelar lulusan setiap jalur pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.

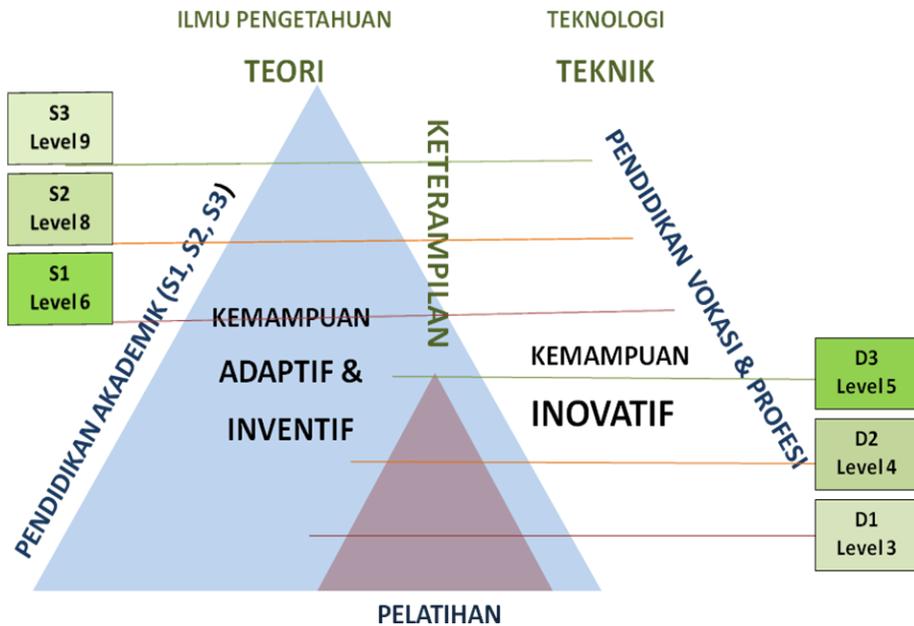
Di dalam pengembangan, KKNI diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan diluar ranah KEMDIKNAS, hal ini dapat melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengalaman individual. Dengan pendekatan tersebut maka KKNI dapat dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia di dalam lingkungannya atau oleh masyarakat luas untuk perencanaan karir individual. Sektor pendidikan formal, misalnya dapat menggunakan KKNI sebagai rujukan dalam merencanakan sistem pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat dengan tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi KKNI dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karir di dunia kerja. Hal ini juga dapat bermanfaat di dalam merencanakan pengembangan relevansi pendidikan tinggi yang lebih komprehensif. KKNI juga dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi untuk melakukan penyesuaian dan penilaian kesetaraan di tingkat nasional tentang kriteria kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya. Sektor-sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, industri, dan lain-lain juga membutuhkan KKNI sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan sumberdaya manusia masing-masing secara lebih komprehensif baik yang berhubungan dengan sistem karir, remunerasi atau pola rekrutmen baru.

Dalam manajemen pengembangan Kurikulum berbasis KKNI maka dapat dilihat pada gambar berikut.

MANAJEMEN PENYUSUNAN KURIKULUM



Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c)metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial. Ke-empat parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNi. Dengan demikian ke-9 jenjang KKNi merupakan deskriptor yang menjelaskan hak, kewajiban dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya.



Uraian tentang parameter pembentuk setiap Deskriptor KKNI adalah sebagai berikut:

- a. Keterampilan kerja atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur-unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut.
- b. Cakupan keilmuan/pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki, sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNI ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.
- c. Metoda dan tingkat kemampuan adalah kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk didalamnya adalah kemampuan berpikir (intellectual skills).

C. **Simpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan :

1. Manajemen adalah proses dimana adanya suatu kegiatan untuk mencapai atau mewujudkan tujuan tertentu yang telah ditetapkan secara bersama didalam organisasi
2. KKNI adalah kerangka penjurangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sector sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan serta program peningkatan SDM secara nasional
3. Manajemen Kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk mewujudkan pencapaian tujuan pengajaran juga meningkatkan kualitas peserta didik. Manajemen kurikulum berbasis KKNI sangat diperlukan guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan kurikulum dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu di Perguruan Tinggi.
- d. Pengembangan kurikulum berbasis KKNI yaitu agar dapat membantu, memahami, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan bisa secara kooperatif dan mandiri mengidentifikasi kebutuhan kurikulum dengan berprinsip pada (1) Produktivitas, (2) Demokratisasi, (3) Kooperatif, Efektivitas dan efisiensi, (4) Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dakir, Jakarta. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. PT. Ranika Cipta
- Eliadian. *Pengertian manajemen, kurikulum, manajemen kurikulum, dan konsep manajemen Kurikulum*
- Fattah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hamalik, Oemar. 2007. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Medira Ferayanti, dkk. 2015. *Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah*. Tim Pengembangan Bahan Pembelajaran LPPKS. Kemendikbud
- Mujammil Qomar, 2007. *Manajemen Pendidikan Islam (Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam)*. Erlangga.
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers